

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERITA
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

**Disusun Oleh :
Innayati Azzamir
228100057**

**Dibawah Bimbingan:
Dr. Nanda Anisa Lubis S.H., M.Kn.**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN KETUA PRODI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
<i>RINGKESAN</i>	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	19
1. Spesifikasi Penelitian	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Tahap Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Alat Pengumpul Data	23
6. Analisis Data	23
7. Lokasi Penelitian	24

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS, PERSEROAN	
TERBATAS, TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN	
PERTANGGUNGJAWABAN	25
A. Tinjauan Tentang Notaris Sebagai Pejabat Umum	25
1. Pengertian Notaris	25
2. Tugas Dan Wewenang Notaris	30
3. Tanggung Jawab Notaris	36
4. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian Notaris	42
5. Pengertian Akta Notaris	43
B. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas	47
1. Pengertian Perseroan Terbatas	47
2. Unsur Perseroan Terbatas	52
3. Dasar Hukum Perseroan Terbatas	55
4. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham	56
C. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum dan	
Pertanggungjawaban	58
1. Pengertian Kepastian Hukum	58
2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	60
BAB III PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM	
PEMEGANG SAHAM OLEH NOTARIS DAN	
PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK	64
A. Tata Cara Pembuatan Akta Berita Acara RUPS Oleh Notaris	64
B. Permasalahan Akta Berita Acara RUPS Dalam Praktek	72

BAB IV PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN DAN TANGGUNG	
JAWAB DALAM PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA	
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	
TERBATAS DITINJAU DARI UUJN	80
A. Penerapan Asas Kehati-Hatian Yang Dilakukan Oleh Notaris	
Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang	
Saham Perseroan Terbatas Ditinjau Dari UUJN	80
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Berita	
Acara Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Kaitannya	
Dengan Penetapan Kuorum Peserta Rapat	87
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang membuat akta autentik, dalam menjalankan tugasnya notaris harus bersikap profesional, bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Prinsip kehati-hatian notaris tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris itu sendiri. Kegagalan menerapkan prinsip kehati-hatian berakibat pada masalah hukum yang serius, termasuk terhadap keabsahan akta yang diterbitkan. Akibat tidak diterapkannya asas kehati-hatian dan akta yang dibuat bertentangan dengan hukum atau melawan hukum maka akta tersebut mengandung cacat yuridis sehingga mengakibatkan akibat hukum yang mana notaris dapat dimintai tanggung jawab, tidak diterapkannya asas kehati-hatian oleh notaris menimbulkan sengketa yang berujung gugatan di pengadilan atas terbitnya Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana penerapan asas kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam kaitannya dengan penetapan kuorum peserta rapat.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan wawancara, yaitu situasi peran antar-pribadi bertatap-muka. Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut di atas sudah seharusnya diterapkan oleh notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam membuat akta autentik, hal tersebut dilakukan sebagai upaya preventif mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari, persoalan yang terjadi adalah bahwa dalam UUJN tidak ada atau belum adanya pasal yang mengatur secara eksplisit bahwa notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Kepastian hukum diperlukan bagi notaris agar adanya aturan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan menjadi jaminan keamanan hukum bagi notaris dari kesewenangan hukum karena dengan adanya aturan notaris dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap notaris dan akibat kesalahan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta RUPS PT implikasi hukumnya adalah akta RUPS yang telah dibuat di hadapan notaris dianggap cacat yuridis dan dianggap tidak sah, maka notaris dapat dimintai tanggung jawab berupa pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban secara pidana dan pertanggungjawaban secara kode etik.

Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian, tanggung jawab notaris, rapat umum pemegang saham.

ABSTRACT

A notary is a public official (openbaar ambtenaar) authorized to make authentic deeds. In performing their duties, a notary must act professionally, be trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties involved in legal acts. The principle of caution for notaries not only serves to protect the interests of the parties involved but also to maintain the integrity and credibility of the notary profession itself. Failure to apply the principle of caution can result in serious legal issues, including affecting the validity of the issued deed. As a result of the failure to apply the principle of prudence and making deeds that are contrary to or violate the law, the deed contains juridical defects, which in turn leads to legal consequences for which the notary can be held accountable. The failure of the notary to apply the principle of prudence leads to disputes that ultimately result in lawsuits in court regarding the issuance of the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company. This study identifies how the principle of prudence is applied by notaries in the preparation of the deed of minutes of the general meeting of shareholders of a limited liability company and the notary's responsibility in making the deed of minutes in relation to determining the quorum of meeting participants.

The specifications of this research are descriptive-analytical. The data approach method used in this study is the normative juridical approach. This research is conducted through library research and field research. The data collection methods used include document study, which is a technique of collecting data by examining documents to obtain data or information related to the research problem, and interviews, which involve face-to-face interpersonal interactions. The data obtained from this research are processed and analyzed using qualitative juridical methods.

The results of this study explain that the application of the aforementioned prudence principle should indeed be implemented by notaries in performing their authority in creating authentic deeds. This is done as a preventive measure to avoid potential legal issues related to the authentic deeds they create in the future. The problem, however, is that in the UUJN (Notary Law), there is no, or not yet any, article that explicitly regulates that notaries are required to apply the principle of prudence in carrying out their duties and authority. Legal certainty is needed for notaries so that there are rules regarding what is allowed or not allowed to be done and to serve as a guarantee of legal protection for notaries against legal arbitrariness. With these rules, notaries can understand what they are permitted to be charged with or required to do by the State. In the event of a failure to apply the principle of prudence in preparing a Shareholders' General Meeting (RUPS) deed, the legal implication is that the RUPS deed made before the notary is considered legally defective and invalid. Consequently, the notary may be held accountable through civil liability, criminal liability, and ethical code liability.

Keywords: Principle of prudence, notary responsibility, general meeting of shareholders.

RINGKESAN

Notaris teh mangrupikeun pejabat umum (openbaar ambtenaar) anu boga wewenang nyieun akta autentik, dina ngalaksanakeun tugasna notaris kudu bersikap profesional, jujur, amanah, saksama, mandiri, teu berpihak, sarta ngajaga kapentingan pihak nu aub dina lampah hukum. Prinsip kahati-hatian notaris teu ngan pikeun ngajaga kapentingan pihak nu aub, tapi oge pikeun ngajaga integritas jeung kredibilitas profesi notaris sorangan. Gagalna nerapkeun prinsip kahati-hatian bakal nyababkeun masalah hukum anu serius, kaasup kana kabeneran akta anu diterbitkeun. Kusabab teu diterapkeunana asas kahati-hatian jeung akta anu dijieun ngalawan hukum atawa nabrak hukum, akta éta ngandung cacad yuridis sahingga nyababkeun akibat hukum anu mana notaris tiasa dipenta tanggung jawab, teu diterapkeunana asas kahati-hatian ku notaris nyababkeun sengketa anu tungtungna gugatan di pangadilan ngeunaan diterbitkeunna Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas. Panalungtikan ieu ngaidentifikasi kumaha penerapan asas kahati-hatian anu dipigawe ku Notaris dina nyieun akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas jeung tanggung jawab Notaris kana nyieun Akta Berita Acara Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dina hubungan jeung panetepan kuorum peserta rapat.

Spésifikasi panalungtikan ieu sifatna deskriptif analisis. Méthode pendekatan data anu dianggo dina panalungtikan ieu nyaéta méthode pendekatan yuridis normatif. Panalungtikan ieu dilakukeun ku panalungtikan pustaka jeung panalungtikan lapangan. Méthode kumpulan data anu dianggo ngaliput studi dokumén nyaéta téknik kumpulan data ku cara nalungtik dokumén pikeun meunangkeun data atawa informasi anu patali jeung masalah anu diteliti jeung wawancara, nyaéta situasi peran antar-pribadi papanggih. Data anu didapet ngalangkungan panalungtikan ieu diolah jeung dianalisis ngagunakeun méthode yuridis kualitatif.

Hasil panalungtikan ieu nerangkeun yén palaksanaan prinsip kahati-hatian anu kasebut di luhur geus saestuna kedah diterapkeun ku notaris dina ngalaksanakeun tugas kawenanganna dina nyieun akta autentik, hal ieu dilakukeun salaku usaha preventif nyegah timbulna masalah hukum kana akta autentik anu dijieunna engkéna, masalah anu kajadian nyaéta yén dina UUN anu aya atawa can aya pasal anu ngatur sacara eksplisit yén notaris dina ngalaksanakeun tugas kawenanganna wajib nerapkeun prinsip kahati-hatian. Kapastian hukum diperlukeun pikeun notaris supaya aya aturan naon anu diwenangkeun atanapi henteu diwenangkeun pikeun dilakukeun sareng janten jaminan kaamanan hukum pikeun notaris tina sewenang-wenang hukum sabab ku ayana aturan, notaris tiasa nyaho naon waé anu tiasa dibebankeun atanapi dilakukeun ku Nagara ka notaris sareng akibat kasalahan henteu nerapkeun prinsip kahati-hatian dina nyieun akta RUPS PT implikasi hukumna nyaéta akta RUPS anu geus didamel di payuneun notaris dianggap cacad yuridis sareng dianggap teu sah, maka notaris tiasa dipenta tanggung jawab dina bentuk tanggung jawab sacara perdata, tanggung jawab sacara pidana sareng tanggung jawab sacara kode etik.

Kecap konci: Prinsip taliti, tanggung jawab notaris, rapat umum pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Rizki Sridadi, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Ahyar Ari Gayo, Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana), Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- C. S. T. Kansil Dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Jala Permata, 2009.
- Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, Organ Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Donni Gusmawan, Perlindungan Hukum di Negara Pancasila, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Donni Prayuda, Teori Pertanggungjawaban, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Erie Hariyanto, Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia, Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Fernando M. Manulang, Hukum Dalam Kepastian, Bandung: Prakarsa, 2007.

- Freddy Hidayat, Mengenal Hukum Perusahaan, Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Gunawan Rasmanto, Teori Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hans Kelsen, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cet. II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Jakarta: Nusamedia, 2011.
- Heriyanti, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana, Jakarta: Yuma Pustaka, 2016.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prananda Media Group, 2014.
- I. G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Jakarta: Kesain Blanc, 2006.
- Ibrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.

- Jimly Asshidiqqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Normatif Dan Empiris, Jakarta: Prenada Group, 2018.
- M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Martono Anggusti, Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2019.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Munir Fuady, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Armiko, 2007.
- P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015.
- Paulus Efendi Lotulung, Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Pujiyono, Hukum Perusahaan, Surakarta: Pustaka Hanif, 2014. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jakarta: Permata Aksara, 2013.
- Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- R. Soesanto, Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Raihan, Metode Penelitian, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta: UII Press, 2014.

- Rusman Hadiano, Indenpendensi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik dan Sanksi yang Dapat Dijatuhkan terhadap Notaris, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Salim H. S, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980.
- Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paranita, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suparji, Transformasi Badan Hukum di Indonesia, Jakarta Selatan: UAI Press, 2015.
- Surnayati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni, 1994.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Yogyakarta: Andi, 2000.
- Waluyadi, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif, Jakarta: Djambatan, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

C. Sumber Lain

Auliaurrosidah & Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol", Jurnal Kenotariatan Narotama", Volume 1 Nomor 2, 2019.

Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", Lex Renaissance, Volume 3, Nomor 2, 2018.

Nawaaf Abdullah & Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4, 2017.

Pupu Sriwulan Sumaya & Maemunah, "Efektifitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris", Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 12 Nomor 2, 2017.

Sibuea Mia Augina Romauli, Rachmi Sulistyarini & Hariyanto Susilo, "Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Komparasi", Jurnal Suara Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2022.

Tiska Sundani, "Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", Premise Law Jurnal, Volume 1, 2017.

Zanuba Arifa Khafsof ZM, Amad Sudiro, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris", Unes Law Review, Volume 6, Nomor 2, 2023.

D. Wawancara

Wawancara dengan Notaris Mario Martin Susanto, S.H., M.Kn., di Kantor Notaris/PPAT Mario Martin Susanto, S.H., M.Kn, di Jalan Taman Kopo Indah III, Blok C Nomor 7, Kelurahan Kopo, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hari Jumat, 26 September 2025, Pukul 13:00 WIB.

Wawancara dengan Erlina Rooskelly Tobing, di Komplek Taman Kopo Indah
II B1 II-A/17, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 29 September
2025, Pukul 10:30 WIB.

E. Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan
Negeri Batam Nomor 50/Pdt.G/2016/PN. Btm.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan
Negeri Batam Nomor 55/Pdt.G/2016/PN. Btm.